**STRATEGI MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DESA MANDIRI**

**Studi di Desa Kemadang Gunungkidul**

**Nugrahani Kusumastuti**

*Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta*

*Email: nugrahanikusuma@gmail.com*

**Mir’atun Nur Arifah**

*Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta*

*Email: miratunnurarifah@uii.ac.id*

**Abstract**

The commitment of the government in developing villages has been implemented in ‘Nawacita Programs’, the theme of Developing Indonesia’s rural areas. For that, the developing country very impossible can regularly, if the government not prepared for this program with the excellently. Hence, this research is the goals for knowing of the strategy which doing of government in the implementation of developing transformation until making Kemadang Village become an independent rural area in 2015 old. In addition, this paper aims to explain about developing transformation form become in Kemadang Village who has an independent rural area. The result of the research shows to us that in the strategy of implementing, is the government of Village Kemadang conducted mapping potential area, coaching and mentoring, building of the network, and implemented of governance village become modern organizations. Meanwhile, the form of developing transformation is increasing of services, and health facilities. For the production of livelihood, society is increasingly in disaster mitigation.

[Komitmen pemerintahan dalam membangun desa tertuang dalam Nawacita, yakni “Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”. Sebuah pembangunan suatu daerah tidak akan terlepas dari campur tangan pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan transformasi pembangunan hingga menjadikan Desa Kemadang menjadi desa mandiri pada tahun 2015. Selain itu, kajian ini hendak menjelaskan bentuk transformasi pembangunan yang terjadi di Desa Kemadang setelah menjadi desa mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal strategi yang dilakukan, pemerintah Desa Kemdang melakukan pemetaan potensi, pembinaan dan pendampingan, membangun sinergisitas dan menerapkan tata kelola desa menjadi organisasi modern. Sedangkan wujud dari transformasi pembangunan itu sendiri ialah terjadi peningkatan pada pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan. Dalam keragaman produksi masyarakat dan program dalam hal mitigasi bencana juga turut meningkat.]

**Keywords**: *developing villages; developing transformation; sustainable livelihood.*

**Pendahuluan**

Dalam upaya mempercepat pembangunan dari pinggiran, pemerintah Indonesia melaksanakan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa dengan pengalokasian dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2015 jumlah dana desa sebesar Rp 20,8 triliun, di tahun 2016 Rp 46,8 tiriliun, di tahun 2017 Rp 60 triliun, di tahun 2018 Rp 111 triliun, dan di tahun 2019 mencapai angka Rp 113 triliun. Dengan jumlah dana yang prestis itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencanangkan terwujudnya 2.000 desa mandiri pada akhir tahun 2019.[[1]](#footnote-1)

Untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan pedesaaan ini, pemerintah mengembangkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang tertuang dalam Buku RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019. Dari RJPMN ini capaian dari target strategis adalah mengurangi jumlah desa tertinggal hingga 5000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa di tahun 2019. Sasaran pembangunan tersebut memerlukan kejelasan desa dan status perkembangannya. Indeks desa membangun tidak hanya berguna untuk mengetahui status perkembangan setiap desa yang lekat dengan karakteristiknya, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai instrumen untuk melakukan targeting dalam pencapaian target RPJMN 2015-2019.[[2]](#footnote-2)

Dalam upaya mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri maka problem yang penting untuk diselesaikan ialah masalah kemiskinan. Di mana kemiskinan selalu mendapat perhatian lebih dari pemerintah Indonesia. Hal ini terjadi karena pemerintah sadar akan pentingnya mengatasi persoalan kemiskinan. Jika gagal mengatasi persoalan ini maka dapat menimbulkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik di tengah masyarakat. Menurut Mubyarto yang dikutip oleh Erwan Agus Purwanto, upaya serius pemerintah terbukti pada tahun 1976-1996, kemiskinan di Indonesia turun drastis dari 40% menjadi 11%.[[3]](#footnote-3)

Masyarakat miskin pada umumnya memiiki kelemahan dalam berusaha karena terbatasnya sarana dan prasarana. Terlebih lagi akses dalam bidang ekonomi sehingga masyarakat miskin semakin tertinggal jauh dengan masyarakat yang memiliki akses dan potensi yang lebih tinggi. Menurut Janianton Damanik, kemiskinan merupakan salah satu indikator pembangunan yang sangat penting. Seberapa maju dan berhasil pembangunan akan tampak dari perubahan-perubahan yang signifikan pada besarnya kemiskinan itu sendiri. Itulah sebabnya pemerintah memiliki kepentingan yang sangat fundamental dalam mengatasi kemiskinan.[[4]](#footnote-4)

Pemerintah memiliki tanggungjawab yang besar dalam memberantas kemiskinan. Usaha pemerintah ini terwujud dalam bentuk program-program pembangunan yang sudah direncakan sebelumnya. Program pembangunan ini dibuat guna meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Semenjak sidang MPR bulan Maret 1978, Indonesia mulai mengenal dan memasuki strategi baru melalui pembangunan nasional yang dikenal dengan sebutan trilogi pembangunan. Strategi terbaru ini bercirikan pemerataan pendapatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan kestabilan nasional yang dinamis.[[5]](#footnote-5) Hakekat tujuan pembangunan adalah terciptanya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Upaya tersebut ditempuh dengan melakukan berbagai program pembangunan yang menyentuh semua masyarakat dan wilayah. Hasil-hasil pembangunan juga diharapkan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.[[6]](#footnote-6)

Dengan kita melihat seberapa meningkat kesejahteraan dan pembangunan di suatu daerah perlu adanya tolok ukur. Peningkatan ini dapat ditandai dengan adanya perubahan struktur di beberapa bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik maupun budaya. Di Indonesia khususnya di desa untuk melihat seberapa maju dan berkembangnya suatu desa dapat dilihat dari statusnya. Status desa ini dapat diketahui melalui kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasar indeks desa membangun, klasifikasi status desa tersebut meliputi desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.[[7]](#footnote-7)

Desa mandiri merupakan status desa tertinggi diantara empat status lainnya, dimana desa mandiri memliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan jumlah kemiskinan yang rendah. Pada umummnya, desa yang jauh dari pusat pemerintahan tingkat kemiskinannya masih tinggi. Namun hal itu tidak berlaku bagi Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak tempuh dari Desa Kemadang menuju kecamatan adalah 3 km, sedangkan menuju kabupaten berjarak 16 km. Meski demikian, Desa Kemadang ini sudah menyandang status sebagai desa mandiri dan satu-satunya desa mandiri yang ada di Kecamatan Tanjungsari.

Desa Kemadang sendiri termasuk ke dalam desa pesisir karena berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Tak heran juga jika pantai, tebing dan gua menjadi salah satu potensi wisata yang ada di desa tersebut. Desa yang awalnya tidak terlalu dilirik wisatawan, sekarang mulai banyak didatangi pelancong dari berbagai daerah untuk melihat keindahan alam di Desa Kemadang. Fenomena ini dilihat oleh pemerintah sebagai peluang dalam memajukan desanya. Pada gilirannya, Desa Kemadang menjadi desa sejahtera dengan tingkat kemiskinan yang menurun dari tahun ke tahun. Kemajuan Desa Kemadang tidak bisa terlepas dari penggunaan strategi yang tepat oleh pemerintah setempat sehingga apa yang ada di desa saat ini sudah sesuai dengan IDM. Berdasarkan pemaparan tersebut, artikel ini hendak menjelaskan strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam mewujudkan trasformasi pembangunan Desa Kemadang menuju desa mandiri serta untuk menilik hasil transformasi pembangunan Desa Kemadang setelah menjadi desa mandiri. Dalam rangka memudahkan saya untuk menjawab dua pertanyaan tersebut maka akan digunakan dua teori; teori yang pertama akan berisi mengenai stategi dalam pembangunan dan teori kedua merupakan indikator dalam desa mandiri.

Pembangunan perdesaan adalah suatu strategi yang memungkinkan kelompok masyarakat miskin di desa, memperoleh apa yang mereka inginkan dan perlukan bagi drinya maupun anak-anaknya. Strategi ini merupakan upaya untuk menolong golongan di antara mereka yang mencari kehidupan di daerah perdesaan untuk menguasai lebih banyak manfaat dari hasil pembangunan.[[8]](#footnote-8) Rahardjo Adisasmita mengemukakan bahwa dalam pembangunan suatu wilayah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

“*Pertama p*emanfaatan sumber daya alam dan sektor-sektor potensial secara produktif, efisien dan efektif. *Kedua,* pembangunan infrastruktur dan sarana pembangunan secara merata ke seluruh bagian wilayah. *Ketiga,* peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sebagai insan pembangunan. *Keempat,* penataan dan pemanfaatan tata ruang pembangunan secara optimal.”[[9]](#footnote-9)

Dalam menentukan strategi pembangunan suatu daerah, perlu penyesuaian dengan program-program yang akan dilaksanakan. Dengan demikian, strategi yang digunakan oleh satu daerah dengan daerah lainnya berbeda karena menyesuaikan program dan potensi yang ada. Menurut Blakely dikutip oleh Mudrajad Kuncoro, mengatakan bahwa “*dalam memilih strategi pembangunan daerah harus memperhatikan tiga aspek berikut yaitu penentuan tujuan dan kriteria, penentuan kemungkinan-kemungkinan tindakan strategi penyusunan target strategi*.”[[10]](#footnote-10)

Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat dalam pembangunan demi terwujudnya daerah yang mandiri. Terdapat sejumlah alternatif yang dapat ditempuh untuk mewujudkan desa mandiri sebagai manifestasi UU No. 6/2014 tentang Desa, yaitu *pertama,* melaksanakan pemetaan potensi desa dan jaringan pasar yang dapat dikelola untuk menjadi sumber ekonomi desa dan ekonomi masyarakat. *Kedua,* menerapkan metode pembinaan dan pembimbingan atau pendampingan langsung untuk melaksanakan percepatan pembangunan dalam aspek sosial budaya, penguatan kapasitas pemerintah desa dan penataan administrasi pemerintah desa. *Ketiga,* membangun sinergitas antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan daerah, dan perencanaan nasional. *Keempat,* membangun tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis kultural desa.[[11]](#footnote-11)

Jikalau sebuah strategi dalam pembangunan ini berhasil dilaksanakan, maka akan berdampak pada pertumbuhan pembangunan berbagai sektor di dalamnya. Untuk melihat seberapa besar keberhasilan sebuah pembangunan maka perlu adanya tolok ukur dari indikator yang telah ditetapkan. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun menguraikan mengenai Indeks Desa Membangun (IDM) untuk mewujudkan desa mandiri. Sebuah desa, dapat dikatakan desa mandiri apabila memilki tiga indeks di dalamnya, yakni indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi. Setiap indeks ini memiliki dimensi dan indikatornya masing-masing.[[12]](#footnote-12)

Berangkat dari realitas ini, oleh karena artikel ini adalah ringkasan tugas akhir atau skripsi, maka saya akan memposisikan diri sebagai pengamat dari berjalannya pembangunan di Desa Kemadang yang sudah berjalan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sehingga mendeskripsikan dan menjelaskan secara rinci mengenai transformasi pembangunan di Desa Kemadang dalam mewujudkan desa mandiri. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunugkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan kriteria, sedangkan dalam hal pengambilan informan menggunakan teknik *purposive* yang meliputi Camat Tanjungsari, Staf Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tanjungsari, Sekretaris Desa Kemadang dan Kepala Dukuh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumnentasi, sedangkan dalam analisis data mencakup tiga kegiatan yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

**Strategi Transformasi Pembangunan Desa Kemadang Menuju Desa Mandiri**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kemadang melakukan 4 strategi untuk membangun desa menuju desa mandiri yang meliputi; *pertama,* melaksanakan pemetaan potensi desa dan jaringan pasar yang dapat dikelola untuk menjadi sumber ekonomi desa dan ekonomi masyarakat. Desa Kemadang merupakan desa yang memiliki banyak potensi wisata, diantaranya ada wisata pantai, gua, air terjun dan lain sebagainya. Diantara banyak wisata yang disuguhkan, wisata pantai yang jumlahnya paling banyak— kurang lebih ada 14 pantai. Pantai–pantai itu antara lain ada Pantai Baron, Sepanjang, Kukup, Sangken, Watu Kodok dan masih banyak terdapat pantai lainnya. Dengan demikian, tidak dipungkiri bahwa Desa Kemadang termasuk ke dalam desa wisata.

Dilihat dari letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia dan juga merupakan daerah pegunungan, tidak heran jika desa ini memiliki begitu banyak sumber daya alam seperti wisata alam. Kepemilikan potensi yang melimpah ini, dijadikan peluang oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakatnya. Wujud dari peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan potensi yang ada adalah dengan membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Salah satu stratregi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Tanjungsari untuk mensejahterakan masyarakatnya adalah dengan mewajibkan pembuatan BUMDes oleh setiap desa. Hal ini berguna untuk meningkatkan kemandirian serta perekonomian masyarakat setempat.

Diantara lima desa yang ada di Tanjungsari, Desa Kemadang merupakan satu-satunya desa yang sudah membentuk BUMDes. Dengan demikian, Desa Kemadang bisa mendapatkan APBDes. Anggaran belanja ini selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai program-program yang telah direncanakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu program yang sedang direncanakan dalam BUMDes Kemadang adalah pembuatan embung. Selain itu juga BUMDes dapat mengelola beberapa potensi yang ada seperti pantai. Pembuatan embung diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Karena dari adanya embung ini, nantinya dapat membuka peluang usaha untuk masyarakat seperti membuka warung makan, masyarakat yang menjadi juru parkir, *tour* *guide* dan sebagainya. Selain itu, pemerintah Desa Kemadang juga berkeinginan untuk memiliki wisata atau aset lain selain pantai maka dirancanglah pembuatan embung.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu strategi Desa Kemadang dalam mewujudkan desa mandiri adalah melihat seberapa besar potensi yang ada. Selanjutnya dengan adanya potensi tersebut, dibentuk atau dirancang program yang sekiranya dapat bermanfaat, baik bermanfaat untuk desa maupun masyarakat sekitar. Adanya program yang sesuai dengan potensi yang ada maka diharapkan pendapatan, kesejahteraan serta kemandirian masyarakat dapat meningkat.

*Kedua,* menerapkan metode pembinaan dan pembimbingan atau pendampingan langsung untuk melaksanakan percepatan pembangunan dalam aspek sosial budaya, penguatan kapasitas pemerintah desa dan penataan administrasi pemerintah desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Desa Kemadang telah menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul, dengan Peraturan Desa No. 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tenaga Kerja Pemerintah Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul No. 17 Tahun 2015 tentang Disiplin Perangkat Desa, dalam bentuk absensi harian dan monitoring administrasi secara berkala dengan kepala desa.[[13]](#footnote-13) Desa Kemadang ini telah melaksanakan tertib administrasi yang ditunjang sistem IT (Teknologi Informasi) yang terintegrasi SID (Sistem Informasi Debitur). Profil desa tersebut diantaranya berisi administrasi umum, kependudukan, keuangan, pembangunan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), BUMDes dan administrasi lainnya.

Selain itu, dalam pelaksanaan ketugasan Pemerintah Desa Kemadang di bidang pemerintahan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan memiliki tujuan, yakni untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan masyarakat ini tertuang dalam penetapan SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan, dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan secara partisipatif. Perencanaan partisipatif di Desa Kemadang dilaksanakan dengan melibatkan semua komponen masyarakat dalam pengambilan keputusan mulai dari pemerintah desa, lembaga desa, kelompok-kelompok masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya.[[14]](#footnote-14)

Dalam hal inisiatif dan kreatifitas pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia), Pemerintah Desa Kemadang melaksanakan pelatihan pendampingan serta pembinaan kepada lembaga desa, kelompok masyarakat dan alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Program yang dijalankan untuk peningkatan SDM ini dengan melakukan pelatihan serta pembinaan kepada lembaga desa dan perangkat desa. Selain itu juga ada pelatihan dan pembinaan kelompok, diantaranya ada kelompok Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), pengrajin, kuliner, forum anak, desa siaga dan lain sebagainya. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan ini diharapkan kualitas SDM di Desa Kemadang semakin meningkat. Dengan begitu akan muncul jiwa kemandirian mayarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM adalah dengan meningkatkan kapasitas masyarakat.

Peningkatan kapasitas masyarakat merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah desa untuk mewujudkan desa mandiri. Langkah-langkah Pemerintah Desa Kemadang antara lain; pemberian pelatihan kelompok tani, nelayan, Pokdarwis serta UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), peningkatan kapasitas pengalaman agama serta pelatihan kelompok adat dan budaya.[[15]](#footnote-15) Adanya kelompok-kelompok adat dan budaya ini menjadikan Desa Kemadang menjadi desa budaya. Desa Kemadang ditetapkan sebagai Desa Budaya berdasarkan SK Gubernur DIY No. 262/KEP/2016 dan pada pelaksanaannya telah ditindak lanjuti dengan SK Kepala Desa Kemadang No. 20.A/KPTS/2015 tetang Pembentukan pengurus Desa Budaya dan SK Nomor 21/KPTS/2015 tentang pembentukan lembaga adat.[[16]](#footnote-16)

Pada strategi kedua ini, Desa Kemadang lebih menekankan pada penguatan kapasitas, penataan administrasi desa dan pembangunan desa dalam aspek sosial budaya. Hal ini dibutikan dengan adanya tertib administrasi, pelatihan-pelatihan untuk kelompok guna meningkatkan keterampilan serta peningkatan kapasitas dalam pengalaman agama. Bukti lainnya adalah terciptanya status desa budaya di Desa Kemadang.

*Ketiga,* membangun sinergitas antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan daerah, dan perencanaan nasional. Untuk membentuk desa yang mandiri diperlukan perencanaan yang matang agar pembangunan bisa berjalan dengan semestinya dan hambatan yang ada dapat dikendalikan. Pencapaian Desa Kemadang untuk menjadi desa mandiri tidak hanya merupakan upaya dari Pemerintah Desa Kemadang semata, akan tetapi ada campur tangan Pemerintah Kecamatan Tanjungsari dan Kabupaten Gunungkidul yang ikut andil dalam pencapaian ini. Keberhasilan pembangunan di Desa Kemadang ini terjadi karena adanya sinergitas antar pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah nasional.

Bentuk dari sinergitas ini ialah saling menjalankan program-program yang telah direncanakan, baik dari pemerintah daerah maupun nasioanal. Pemerintah daerah memiliki program yang kemudian dijalankan oleh pemerintah desa. Begitulah kiranya yang terjadi di Desa Kemadang. Kecamatan Tanjungsari sendiri telah merencanakan program-program melalui PIWK maupun program dari PIS. Salah satu program PIWK adalah pembuatan BUMDes. Ketika desa memasukkan BUMDes dalam program kerja maka APBDes akan cair. Anggaran dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk biaya program dan kegiatan desa lainnya. Seperti diketahui sebelumnya, Desa Kemadang sudah memiliki BUMDes dan dimana badan usaha ini dirasa mampu meningkatkan kas desa.

Meskipun pemerintah desa dengan pemerintah daerah maupun pemerintah nasional sudah baik dalam sinergitasnya, hal ini tidak akan cukup jika tidak ada sinergitas dengan masyarakat. Pembangunan akan berjalan dengan baik dan berhasil apabila pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat, karena masyarakat yang menjadi sasaran utama dalam pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah Desa Kemadang telah mampu menjalankan konsep tersebut. Jika masyarakat tidak mau diajak bekerjasama dalam pembangunan, maka tidak akan ada status desa mandiri di Desa Kemadang saat ini. Hal ini dapat dilihat dari program-program yang telah dijalankan pemerintah desa, dimana masyarakat mau menerima dan berpartisipasi aktif di dalamnya.

Adanya sinergitas antara pemeritah desa dengan masyarakat akan memudahkan keberlangsungan dalam pembangunan di Desa Kemadang. Dengan begitu, tujuan yang dibangun dari awal akan terwujud. Masyarakat menjadi sejahtera, perekonomian meningkat dan kemandirian desa dapat tercipta.

Dengan demikian, untuk melakukan sebuah pembangunan akan lebih berhasil dan berjalan dengan baik apabila bekerjasama dengan beberapa pihak. Keberhasilan pembangunan di Desa Kemadang saat ini tidak bisa lepas dari campur tangan pemerintah daerah dan pemerintah nasional. Oleh karena itu, Desa Kemadang terus membangun sinergitas dengan semua stakeholder pemerintah dalam menjalankan sebuah program dan perencanaan pembangunan. Pembangunan daerah pun tidak akan berjalan sempurna tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Tak hanya pemerintah daerah dan nasional, pemerintah Desa Kemadang juga terus mengembangkan sinergitas dengan masyarakat untuk terwujudnya pembangunan sesuai rencana dan tujuan.

*Keempat,* membangun tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis kultural desa. Pemerintah Desa Kemadang dalam menjalankan pemerintahan telah menggunakan sistem teknologi informasi berbasis internet. Segala macam administrasi desa, kependudukan, keuangan dan pelayanan masyarakat menggunakan sistem komputerisasi. Desa Kemadang sendiri sudah memiliki website dengan alamat http://kemadang-tanjungsari.desa.id/first. Dalam website ini berisi mengenai profil desa, data desa, lembaga desa, wisata desa, berita terbaru mengenai Desa Kemadang dan sebagainya—sehingga untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat pemerintah Desa Kemadang menyediakan fasilitas internet gratis yang ditetapkan dengan Surat Edaran Kepala Desa No. 1 Tahun 2015 tentang Layanan Internet Gratis.

Pembangunan di Desa Kemadang meski sudah maju dan telah *melek* teknologi namun tidak pernah menggeser budaya asli di desa itu sendiri. Pemerintah serta masyarakat Desa Kemadang selalu berusaha keras untuk menjaga tradisi serta budaya yang ada. Salah satu bentuk bahwa Desa Kemadang masih mempertahankan budaya-budaya lokal adalah dengan adanya status desa budaya. Banyak budaya yang masih dilestarikan di Desa Kemadang dengan membentuk lembaga adat, budaya dan kesenian, antara lain kelompok karawitan, hadroh, sholawatan, jatilan, reog, reog kreasi, wong ireng, seni tari, ketoprak, seni pedalangan, gejog lesung, doger, bergodo prajurit dan paduan suara. Adanya status sebagai desa budaya ini juga menjadi keunikan dan daya tarik tersendiri bagi Desa Kemadang.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Kemadang dalam pelestarian adat, tradisi dan budaya adalah menjalankan program-progam terkait budaya. Program tersebut antara lain melakukan pelestarian terhadap upacara adat dan tradisi yang berkembang di wilayah Desa Kemadang, pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok kesenian yang ada di wilayah Desa Kemadang serta pengalokasian anggaran pemerintah desa melalui APBDes dalam pelestarian, pembinaan dan pendampingan adat, tradisi, seni, budaya dan perilaku ramah tamah. Budaya yang masih terjaga di Desa Kemadang antara lain sedekah laut, rasulan, wayang, gumreg dan lain sebagainya.

Pada startegi terakhir, yang keempat, yaitu membangun tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis kultural desa. Pada penerapannya Pemerintah Desa Kemadang terus berupaya melakukan penataan menjadi lebih baik, yang mana tata kelola yang dilakukan sudah sesuai zaman dan tidak lagi secara manual, seperti adanya website desa. Dengan adanya website desa ini masyarakat bisa dengan mudah mengetahui berita terbaru yang sedang terjadi di Desa Kemadang. Meski perkembangan teknologi sudah maju, pemerintah beserta masyarakat Desa Kemadang tetap melestarikan budaya dan tradisi yang ada.

**Transformasi Pembangunan Desa Kemadang Setelah Menjadi Desa Mandiri**

Setelah Pemerintah Desa Kemadang dirasa telah berhasil menerapkan strategi dalam transformasi pembangunan menuju desa mandiri, hal selanjutnya yang dapat dilakukan adalah melihat bentuk transformasi pembangunan Desa Kemadang setelah menjadi desa mandiri. Desa Kemadang telah menjadi desa mandiri pada tahun 2015. Untuk melihat seberapa berhasilkah Desa Kemadang menjadi desa mandiri serta bagaimana bentuk transformasi pembangunan yang terjadi setelah menjadi desa mandiri, maka harus melihat terlebih dahulu indikator keberhasilannya. Indikator keberhasilan desa mandiri tertuang dalam Indeks Desa Membangun (IDM).

*Dimensi Ketahanan Sosial*

Dalam indeks ini terdapat empat dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, modal sosial dan permukiman. Akan tetapi, saya tidak menjabarkan keempat dimensi ini melainkan hanya fokus pada dimensi kesehatan. Dimensi ini dirasa unik dan ada beberapa fasilitas yang ada di Desa Kemadang yang belum tentu dimiliki oleh desa–desa lainnya. Hal tersebut yang melatarbelakangi saya memilih untuk lebih fokus pada dimensi ini.

Sebelum menjadi desa mandiri, Desa Kemadang hanya memiliki 85 kader kesehatan. Kader kesehatan ini belum termasuk dukun pijat, juru rawat, kader KB maupun juru sembuh non medis. Akan tetapi, setelah menjadi desa mandiri jumlah tenaga kesehatan di Desa Kemadang semakin meningkat. Tidak hanya jumlah tenaga kesehatan saja yang meningkat, namun kualitas pelayanan kesehatan juga turut meningkat. Hal ini dibarengi juga dengan sarana dan prasarana kesehatan yang semakin baik. Untuk sampai ke prasarana kesehatan pun tidak membutuhkan waktu lama, kurang dari 30 menit. Sedangkan untuk tenaga kesehatan sudah cukup lengkap meski belum ada dokter, karena dokter ditempatkan di puskesmas utama, yakni Puskesmas Tanjungsari. Berikut adalah fasilitas kesehatan yang ada di Desa Kemadang pada tahun 2017.[[17]](#footnote-17)

*Tabel 1. Kader atau Tenaga Kesehatan di Desa Kemadang*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Fasilitas Kesehatan** | **Jumlah** |
| 1 | Dokter | 0 |
| 2 | Bidan | 3 |
| 3 | Juru rawat | 7 |
| 4 | Kader kesehatan/yandu | 85 |
| 5 | Kader KB | 58 |
| 6 | Dukun bayi | 0 |
| 7 | Dukun pijat | 14 |
| 8 | Juru sembuh non medis | 3 |

Sumber: Dokumen Desa Kemadang Tahun 2018

Di Desa Kemadang fasilitas fisik untuk kesehatan sudah cukup lengkap meski baru berupa puskesmas dan belum ada rumah sakit. Dulu sebelum menjadi desa mandiri warga Desa Kemadang masih kesulitan untuk berobat ke puskesmas dikarenakan tidak adanya transportasi yang memadai. Namun, sekarang desa ini sudah memiliki ambulan desa yang siap melayani, mengantar dan menjemput masyarakat yang sedang sakit secara gratis.

Selain memiliki ambulan dan puskesmas pembantu, Desa Kemadang juga memiliki posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya. Untuk posyandu sendiri setiap dusun memiliki satu posyandu dan semua fasilitas kesehatan yang ada aktif melayani masyarakat hingga sekarang.

*Tebel 2. Fasilitas Kesehatan yang Dapat di Akses Masyarakat Desa Kemadang*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **FASILITAS KESEHATAN** | **JUMLAH** |
| 1 | RSU | 0 |
| 2 | RS Swasta | 0 |
| 3 | Puskesmas | 1 |
| 4 | Puskesmas pembantu | 1 |
| 5 | Posyandu | 17 |
| 6 | Posyandu lansia | 7 |
| 7 | Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu untuk Penyakit Tidak Menular) | 1 |

Sumber: Dokumen Desa Kemadang Tahun 2018

Selain adanya fasilitas untuk menunjang peningkatan kesehatan, masyarakat dapat mengakses BPJS. Warga masyarakat Desa Kemadang sudah sadar akan pentingnya memiliki asuransi kesehatan. Oleh karena itu, di desa ini tingkat kepesertaan masyarakat dalam kepemilikan kartu BPJS sudah cukup banyak.

Dalam dimensi kesehatan ini, bentuk transformasi pembangunan yang dilihat berupa peningkatan sarana dan prasarana penunjang kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah kader kesehatan dan fasilitas kesehatan seperti ambulan desa, yang mana tak semua desa dapat memiliki ambulan sendiri. Dengan banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Kemadang, diharapkan masyarakat semakin peduli dan lebih rajin memeriksa kesehatannya. Adanya ambulan desa juga memudahkan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan.

*Dimensi Ketahanan Ekonomi*

Jika sebelum memiliki status menjadi desa mandiri mata pencaharian utama warga masyarakat Desa Kemadang adalah bertani, tapi sekarang mata pencaharian mereka lebih beragam. Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) dilakukan secara sederhana dan jenis teknologi yang di desain dan diperuntukkan bagi kelompok kerja masyarakat (pokmas). Pemerintah Desa Kemadang berkomitmen dalam merencanakan dan mengembangkan produk inovasi unggulan desa yang bersinergi. Sejauh ini, pemerintah desa telah merealisasikan jenis kegiatan inovasi produk unggulan, diantaranya adalah inovasi masak serba ikan, pengrajin kerang, bambu, pandan, spon, produksi garam rakyat, penangkaran udang lobster dan pembesaran abalon serta inovasi peralatan pertanian.[[18]](#footnote-18)

Selama ini, pelaku wisata di Desa Kemadang rata-rata menjadi pedagang hasil laut dan nelayan, setelah pemerintah turun tangan memberikan bantuan berupa pelatihan kepada masyarakat maka jenis pekerjaan pelaku wisata semakin bertambah. Pelatihan yang dilakukan ini berguna untuk meningkatkan keterampilan serta keahlian masyarakat dalam mengolah hasil laut, baik diolah sebagai makanan maupun kerajinan. Walhasil, masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan serta perekonomiannya. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Desa Kemadang menjalankan beberapa program, antara lain mengembangkan produk unggulan desa. Di mana pemerintah Desa Kemadang memberikan pendampingan terhadap kelompok masyarakat, individu maupun kelompok UMKM baik dari sisi kualitas produk, kreatifitas, inovasi maupun pemasaran hasil produksi. Selain itu, ada pula program untuk mendukung pengembagan inovasi UMKM Pemerintah Desa Kemadang telah merencanakan RPJMDes Desa Kemadang pada tahun 2015-2020.[[19]](#footnote-19)

Pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah ini dilakukan oleh beberapa instansi seperti Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta dan instansi lainnya. Pelatihan ini langsung diberikan kepada kelompok seperti kelompok Pokdarwis. Sselain diberikan pelatihan juga bantuan berupa pemberian peralatan dan modal usaha. Setelah diberi pelatihan tersebut anggota kelompok kemudian mempraktikkannya di rumah untuk kemudian menjual hasil kerajinan tersebut di pantai. Salah Satu kerajinan yang banyak di jual di pantai-pantai adalah kerajinan dari kerang. Kerajinan ini ada berupa tirai, tempat tisu, bros, gantungan kunci, hiasan meja dan lain sebagainya. Kerajinan yang dijual berkisar dari harga Rp. 2.000,00 sampai dengan Rp. 130.000,00.

Selain pembuatan kerajinan ada juga pelatihan pengolahan hasil pantai menjadi makanan. Di pantai-pantai yang ada di Kemadang, hasil pantai yang di peroleh nelayan berupa ikan laut seperti bawal dan kakap, lobster, udang dan sebagainya. Selanjutnya hasil tangkapan nelayan ini akan diolah menjadi ikan bakar atau goreng, ikan *crispy* dan aneka makanan lainnya.

Mengingat bahwa Desa Kemadang merupakan desa wisata, maka tidak dipungkiri jika disana terdapat banyak sektor perdagangan seperti warung-warung maupun pasar. Selain itu, di Desa Kemadang juga banyak terdapat usaha restoran, kedai makanan, hotel maupun penginapan. Dengan tersedianya pelayanan perdagangan ini memudahkan warga masyarakat dalam mengakses pelayanan perdagangan. Di Desa Kemadang juga ada beberapa kelompok usaha yang menjadi motor penggerak roda ekonomi masyarakat, antara lain kelompok usaha pedagang, kelompok pengolah dan pemasar hasil laut, perhimpunan hotel dan restoran Indonesia dan masih banyak lagi.

Status desa mandiri dan desa wisata ini berdampak pada sektor ekonomi masyarkat Desa Kemadang, terbukti dengan berkurangnya angka pengangguran dan meningkatnya mata pencaharian di sektor wisata. Untuk penguatan ekonomi kelembagaan masyarakat, pemerintah Desa Kemadang telah memfasilitasinya dengan membangun sarana penunjang ekonomi masyarakat seperti koperasi dan BMT. Sedangkan untuk akses masyarakat merasa mudah dalam mengakses pelayanan ekonomi.

Pada dimensi ekonomi ini, bentuk transformasi pembangunan yang dapat dilihat adalah semakin beragamnya mata pencaharian masyarakat di Desa Kemadang, terlebih pada aspek produk unggulan. Masyarakat yang awalnya mayoritas sebagai petani, kini mulai menambah pekerjaannya sebagai pelaku usaha. Hal ini tak lepas dari usaha pemerintah untuk mengembangkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan dan bantuan berupa pemberian alat atau modal usaha. Harap dengan adanya bantuan pemerintah, kualitas SDM masyarakat Desa Kemadang semakin membaik sehingga masyarakat mampu meningkatkan taraf hidup dan mata pencaharian yang ada semakin beraneka ragam.

*Dimensi Ketahanan Ekologi*

Desa Kemadang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Hal ini menyebabkan Desa Kemadang memiliki potensi besar dalam hal bencana alam seperti gempa bumi maupun tsunami. Oleh karena itu, dirancanglah desa yang tanggap dan siaga bencana. Untuk meningkatkan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, Pemerintah Desa Kemadang telah membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yang ditetapkan dengan SK Kepala Desa No. 20/KTSP/2015 tentang pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB). Pada tahun 2017 Pemerintah Desa Kemadang telah melakukan kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul tentang fasilitas penguatan kelembagaan daerah bidang pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa Tanggap Bencana (Destana). Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Desa Tangguh Bencana, Pemerintah Desa Kemadang telah menganggarkan dalam APBDes.

Ada beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kemadang dalam mendukung ketahanan ekologi ini, antara lain melakukan kerjasama dengan SAR (*Search and Rescue*), FPRB, TAGANA (Taruna Siaga Bencana) dan POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) dalam rangka pengawasan pantai dan pariwisata, mengingat Desa Kemadang sebagai daerah tujuan wisata dan rawan bencana. Selain itu, ada pula langkah dalam penyediaan fasilitas ruang kerja bagi Babinsa (Bintara Pembina Desa), Bhabinkamtibnas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan FPRB, menjalankan program penerangan jalan dengan swadaya masyarakat, melakukan pembentukan dan pembinaan kelompok Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) serta Linmas (Perlindungan Masyarakat), perencanaan kontingensi dan mitigasi bencana di wilayah Desa Kemadang, dan lain sebagainya.[[20]](#footnote-20)

Sebelum menjadi desa mandiri, Desa Kemadang belum ada program khusus dalam hal tanggap bencana. Setelah menjadi desa mandiri, program mengenai ketahanan ekologi mulai banyak dilaksanakan. Oleh karena itu, dibentuklah desa tanggap dan siaga bencana. Ini semua dilakukan guna untuk mengantisipasi jika suatu saat ada bencana maka masyarakat bisa merasa terlindungi karena sudah ada kelompok-kelompok tanggap bencana. Hal inilah yang dapat dilihat dari bentuk transformsi pembangunan Desa Kemadang menuju desa mandiri dalam dimensi ketahanan ekologi.

**Penutup**

Gelar sebagai desa mandiri merupakan kebanggaan tersendiri bagi Desa Kemadang. Kesuksesan ini tidak bisa lepas dari upaya pemerintah desa dalam melakukan pembangunan yang terwujud dalam strateg-strategi yang telah dilakukan dan bisa dikatakan berhasil karena dapat membawa desa kemadang menjadi satu-satunya desa mandiri di Gunungkidul. Keberhasilan ini dapat dibuktikan dengan apa yang terjadi di Desa Kemadang saat ini sudah sesuai dengan indikator desa mandiri berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun menguraikan mengenai Indeks Desa Membangun (IDM).

Kendati demikian, masih perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana di beberapa sektor agar masyarakat semakin mudah dalam mengakses pelayanan umum tersebut, seperti perlu adanya tenaga kesehatan dokter untuk menunjang kelengkapan pelayanan fasilitas yang ada. Selain itu juga dalam akses pendidikan non formal, perlu lebih ditingkatkan lagi mengenai pendidikan keterampilan atau kursus. Selanjutnya dalam hal aspek distribusi, perlu dibentuk atau dibangun kantor pos karena di Desa Kemadang belum ada kantor pos. Sedangkan dalam hal sensus penduduk, ada baiknya dilakukan secara berkala dan lebih teliti ketika memasukan data atau laporan. Inilah yang menurut hasil observasi saya perlu dilakukan perbaikan. Hal ini guna untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan di Desa Kemadang.

**Daftar Pustaka**

Alfian. (1986). *Transformasi Sosial Budaya Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: UI Press.

Badan Pusat Statistik. (2017). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2017*. Yogyakarta.

Dokumen Desa Kemadang Tahun 2018.

Erwan Agus Purwanto. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebiiakan Anti Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *10*(2).

Hamidi, H., & et.al. (2015). *Indeks Desa Membangun 2015*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Janianton Damanik. (2005). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.

Mudrajad Kuncoro. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.

Rahardjo Adisasmita. (2004). *Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Robert Chambers. (1987). *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. (Pepep Sudrajat, Ed.). Jakarta: LP3ES.

Suryanto. (2017). *Strategi Akselerasi Mewujudkan Desa Mandiri sebagai Manifestasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Bappenas.

1. Suryanto, *Strategi Akselerasi Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Manifestasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Jakarta: Bappenas, 2017), hal. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hanibal Hamidi and et.al, *Indeks Desa Membangun 2015* (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015), hal. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Erwan Agus Purwanto, “Mengkaji Potensi Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Untuk Pembuatan Kebiiakan Anti Kemiskinan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 2 (2007). [↑](#footnote-ref-3)
4. Janianton Damanik, *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2005), hal. 17. [↑](#footnote-ref-4)
5. Alfian, *Transformasi Sosial Budaya Dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 3. [↑](#footnote-ref-5)
6. Badan Pusat Statistik, “Statistik Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2017” (Yogyakarta, 2017), hal. 3. [↑](#footnote-ref-6)
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Indeks Desa Membangun. [↑](#footnote-ref-7)
8. Robert Chambers, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, ed. Pepep Sudrajat (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 188. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rahardjo Adisasmita, *Pertumbuhan Wilayah Dan Wilayah Pertumbuhan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hal. 116. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi Perencanaan, Strategi Dan Peluang* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), hal. 49. [↑](#footnote-ref-10)
11. Suryanto, *Strategi Akselerasi Mewujudkan Desa Mandiri Sebagai Manifestasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, hal. 2. [↑](#footnote-ref-11)
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. [↑](#footnote-ref-12)
13. Dokumen Desa Kemadang Tahun 2018 [↑](#footnote-ref-13)
14. Dokumen Desa Kemadang Tahun 2018 [↑](#footnote-ref-14)
15. Dokumen Desa Kemadang Tahun 2018 [↑](#footnote-ref-15)
16. Dokumen Desa Kemadang Tahun 2018 [↑](#footnote-ref-16)
17. Dokumen Desa Kemadang tahun 2018 [↑](#footnote-ref-17)
18. Dokumen Desa Kemadang Tahun 2018 [↑](#footnote-ref-18)
19. Dokumen Desa Kemadang Tahun 2018 [↑](#footnote-ref-19)
20. Dokumen Desa Kemadang Tahun 2018 [↑](#footnote-ref-20)